



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AWAN HERMAWAN PURWADINATA**
2. Jabatan : **DIREKTUR PRASARANA**
3. NHK : **97563**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 5.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 285 m2/150 m2 di BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/83 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/196 m2 di BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 519 m2/180 m2 di BANDUNG BARAT, WARISAN Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/28 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 820.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, MINI COOPER COUNTRYMAN F60 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 39.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 250.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 1.589.443.911****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 7.948.443.911**

III. HUTANG **Rp. ----**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.948.443.911

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.